

Masyarakat Desa Hutan Membayangkan Reformasi Birokrasi

Semiarto A. Purwanto
Departemen Antropologi, FISIP UI

Abstrak

Manfaat kajian tata pemerintahan yang baik dan otonomi daerah yang langsung ditujukan pada perbaikan kinerja struktur pemerintahan sangat penting dan mendesak dilakukan. Namun, hampir semua kajian yang pernah dibuat menekankan pentingnya fokus perhatian pada struktur pemerintahan, bentuk pengelolaan birokrasi dan proses transformasi ke arah otonomi daerah. Padahal, kajian yang menunjukkan bagaimana masyarakat melihat gegap gempita di bidang pemerintahan itu juga merupakan suatu hal penting. Selama puluhan tahun, masyarakat berada dalam subordinasi negara dan sejak masa reformasi posisi masyarakat semakin kuat. Sebegitu jauh, usaha untuk melihat bagaimana masyarakat di level desa memandang perubahan tata pemerintahan ini belum terjelaskan dengan tuntas. Selama puluhan tahun, desa mengalami proses marginalisasi sehingga pantas untuk kita tengok bagaimana perubahan itu dilihat oleh warga desa.

Makalah ini akan menggambarkan bagaimana masyarakat desa membayangkan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten sehingga kita mendapatkan rekaman dari sudut pandang masyarakat desa. Kasus pada komunitas orang Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam mengamati kabupaten konservasi sebagai program reformasi birokrasi kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan konteks yang rumit dan saling kait antar berbagai faktor. Konsep kabupaten konservasi muncul sebagai hasil proses interaksi berbagai kepentingan dan tekanan dari dalam dan luar. Konteks reformasi, pentingnya *good governance*, pemberantasan illegal logging, pembangunan berkelanjutan, isu biodiversitas dan konservasi laksana gerbong kereta api panjang yang harus dicerna oleh komunitas di Sungai Utik.